

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: (Kajian Konseptual, Perbandingan, dan Relevansinya sebagai Sarana Pendidikan Politik)

Yayan Sahi

Prodi PKn, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Email:

yayansahi1999@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine Civic Education (PKn): A Conceptual, Comparative Study, and Its Relevance as a Means of Political Education. The research method used is library research, which involves analyzing various relevant academic literature. The findings indicate that PKn plays a strategic role in shaping citizens who are aware of their rights, obligations, and responsibilities toward the state and society. The primary objectives of PKn include strengthening democratic values, human rights, pluralism, tolerance, and social morality. Moreover, PKn functions as an instrument for building national character, enhancing political awareness, and preparing the younger generation to actively participate in democratic life. As a medium of political education, PKn provides a foundational understanding of citizenship rights, including civil, political, and social rights. This education aims to enhance political knowledge, political awareness, political attitude, political efficacy, and political participation among the public. Through an interdisciplinary approach that integrates political science, law, and moral philosophy, PKn contributes to the development of critical, rational, and responsible citizens. Additionally, PKn plays a crucial role in maintaining the Pancasila democratic system and preparing citizens to face global challenges such as disinformation, political polarization, and environmental crises. This study concludes that PKn not only serves as an instrument of political education but also as a vital element in maintaining democratic stability in Indonesia.

Keywords: Civic Education, Conceptual, Comparative, Political Education

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan (PKn): Kajian Konseptual, Perbandingan, dan Relevansinya sebagai Sarana Pendidikan Politik. Metode dalam penelitian ini ialah library research dengan menelaah berbagai literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Tujuan utama PKn mencakup penguatan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, serta moralitas sosial. PKn juga berfungsi sebagai instrumen dalam membangun karakter kebangsaan, meningkatkan kesadaran politik, serta mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Sebagai sarana pendidikan politik, PKn memberikan dasar pemahaman tentang hak-hak kewarganegaraan, termasuk hak sipil, politik, dan sosial. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan political knowledge, political awareness, political attitude, political efficacy, serta political participation di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu politik, hukum, dan filsafat moral, PKn berkontribusi dalam membangun warga negara yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Selain itu, PKn berperan dalam mempertahankan sistem demokrasi Pancasila dan mempersiapkan warga negara dalam menghadapi tantangan global seperti disinformasi, polarisasi politik, dan krisis lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PKn tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendidikan politik tetapi juga sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Konseptual, Perbandingan, Pendidikan Politik

PENDAHULUAN

Ada kesalahan persepsi ketika Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dipahami hanya sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada aspek pendidikan semata. Padahal, muatan PKn jauh lebih kompleks dan tidak terbatas pada domain pendidikan. PKn sebenarnya mencakup ranah hukum dan politik sebagai bagian integral dari kajian keilmuannya. Dengan kata lain, PKn bukan hanya tentang transfer pengetahuan atau pembentukan karakter di ruang kelas, tetapi juga tentang pemahaman mendalam terhadap sistem hukum, prinsip-prinsip politik, dan praktik kewarganegaraan dalam kehidupan nyata.

Pertanyaan kritis yang muncul adalah: Apakah PKn hanya sekadar alat untuk membentuk warga negara yang patuh, ataukah ia juga bertujuan untuk menciptakan warga negara yang kritis dan mampu mempertanyakan status quo? Jika PKn hanya dipahami sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kepatuhan, maka ia berisiko menjadi alat indoktrinasi. Namun, jika PKn dipahami sebagai sarana untuk membekali warga negara dengan pengetahuan hukum, keterampilan politik, dan kemampuan berpikir kritis, maka ia dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi.

Selain itu, penting untuk mempertanyakan bagaimana peran PKn dalam menghadapi tantangan global seperti disinformasi, polarisasi politik, dan krisis lingkungan? PKn seharusnya tidak hanya berfokus pada isu-isu domestik, tetapi juga

perlu membekali warga negara dengan pemahaman tentang isu global dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dengan demikian, memahami PKn secara menyeluruh, yang meliputi aspek pendidikan, hukum, dan politik, serta membandingkan praktiknya di berbagai negara, dapat memperluas perspektif kita tentang hakikat dan esensi PKn. Artinya, PKn bukan hanya tentang membentuk warga negara yang baik, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang kritis, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education* atau *Citizenship Education*) merupakan perluasan dari mata pelajaran "*Civics*" dan lebih menekankan pada pendidikan orang dewasa serta berorientasi pada praktik kewarganegaraan. Artinya, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada pembelajaran di sekolah, tetapi juga mencakup upaya untuk membekali individu, termasuk orang dewasa, dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendekatan ini menekankan pentingnya penerapan langsung nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks nyata, seperti partisipasi dalam proses demokrasi, keterlibatan dalam komunitas, dan tanggung jawab sosial (Wahab & Sapriya, 2023)

Penamaan mengenai *Civic/citizenship education* secara universal bervariasi di berbagai negara. Di Britania Raya, istilah yang digunakan adalah "*Citizenship Education*",

sementara di Amerika Serikat dikenal sebagai "*Civic Education*". Di Indonesia, istilah yang digunakan adalah "*Pendidikan Kewarganegaraan*". Di Timur Tengah, pendidikan ini disebut "*Ta'limatul Muwwatanah*" atau "*Tarbiyatul Al Wathoniyah*", sedangkan di Meksiko dikenal sebagai "*Educacion Civicas*". Di Jerman, istilah yang digunakan adalah "*Sachunterricht*", sementara di Australia disebut "*Civics*". Di Selandia Baru, pendidikan ini dikenal sebagai "*Social Studies*", dan di Afrika Selatan disebut "*Life Orientation*". Di Hungaria, istilah yang digunakan adalah "*People and Society*", sedangkan di Singapura dikenal sebagai "*Civics and Moral Education*" (Khoiri et al., 2017)

Indonesia dikenal sebagai negara yang menempatkan prioritas tinggi pada pembentukan karakter warga negara. Salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah disiplin ilmu kewarganegaraan. Pada dasarnya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan proses untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keindonesiaan, kepribadian nasional, semangat kebangsaan, serta rasa cinta tanah air. Setiap sarjana atau profesional yang terdidik di Indonesia diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang negaranya, kepribadian yang selaras dengan budaya Indonesia, rasa kebangsaan yang kuat, dan kecintaan yang tulus terhadap tanah air. (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, 2016).

Hal ini sejalan dengan konsep yang menyatakan bahwa pengajaran kewarganegaraan di Indonesia dan negara-

negara Asia pada umumnya lebih menekankan aspek moral (pembentukan karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional, serta perspektif internasional. Pendekatan ini berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan di Amerika dan Australia, yang lebih berfokus pada pentingnya hak dan tanggung jawab individu, sistem dan proses demokrasi, hak asasi manusia (HAM), serta ekonomi pasar. (Subdi, 2007).

Untuk itu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan negara-negara Asia cenderung berorientasi pada pembentukan karakter individu, penguatan identitas nasional, kepentingan bersama, dan pemahaman terhadap dinamika global. Sementara itu, di Amerika dan Australia, pendidikan kewarganegaraan lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban individu, prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan HAM, serta pemahaman tentang mekanisme ekonomi pasar. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam penekanan nilai dan fokus pembelajaran antara kedua wilayah dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.

Beberapa komparasi mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di berbagai negara dapat ditemukan dalam beberapa kutipan tulisan yang dirujuk oleh (Rinenggo, 2021) diantaranya terurai sebagai berikut;

1. Norwegia

Di Norwegia, pendidikan kewarganegaraan telah dikembangkan selama hampir 200 tahun, dengan fokus utama pada konstitusi dan struktur formal lembaga-lembaga politik negara.

Orientasinya adalah pada partisipasi politik dan cita-cita demokrasi, di mana Konstitusi Norwegia tahun 1814 menjadi materi wajib bagi generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Norwegia, mencerminkan komitmen negara dalam membangun kesadaran politik dan demokrasi sejak dini. Melalui pendekatan ini, Norwegia tidak hanya mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi bagi partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Borhaug, 2010: 66-67).

2. Swedia

Di Swedia, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai jembatan bagi siswa untuk terlibat dalam praktik demokratis, mempersiapkan mereka untuk partisipasi aktif di masyarakat. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya diajarkan tentang mekanisme dan proses politik formal, tetapi juga dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai isu-isu identitas dan kesetaraan. Hal ini mencerminkan komitmen Swedia dalam menciptakan generasi yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mampu menghargai keragaman dan memperjuangkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menekankan aspek identitas dan

kesetaraan, pendidikan kewarganegaraan di Swedia bertujuan untuk membentuk warga negara yang inklusif, kritis, dan siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan (Lindsrom, 2013: 20-27)

3. Inggris dan Belanda

Di Inggris, pendidikan kewarganegaraan lebih mengarah pada materi moral dan secara bertahap kembali pada tradisi multikultural. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai etika dengan keragaman budaya yang semakin berkembang di masyarakat. Sementara itu, di Belanda, pendekatan multikultural tetap konsisten dan menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan kewarganegaraan. Konsistensi ini menunjukkan komitmen Belanda dalam membangun kesadaran akan keberagaman dan inklusivitas sebagai bagian integral dari pembentukan warga negara. Perbedaan antara kedua negara ini tidak hanya terletak pada penekanan nilai, tetapi juga pada cara mereka mengintegrasikan aspek multikultural ke dalam kurikulum, di mana Inggris lebih bertahap, sedangkan Belanda lebih konsisten dan terstruktur (Mattei & Broeks, 2016: 2-15).

4. Luksemburg, Finlandia, Polandia dan Romania.

Di Luksemburg, pendidikan kewarganegaraan lebih mengarah pada

pengaruh budaya politik terhadap masyarakat, dengan fokus pada mendeteksi persamaan dan perbedaan dalam pengembangan warga di masyarakat Eropa modern. Teknik Lycee digunakan untuk mengarahkan siswa pada kehidupan dan kewajiban moral menuju persatuan warga. Sementara itu, di Finlandia, pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada demokratisasi, yang membuka jalan menuju belajar seumur hidup dan pengembangan keterampilan, serta berfokus pada investasi untuk menghadapi daya saing internasional dan penyampaian budaya yang mengarah pada politisasi negara.

Di Polandia, pendidikan kewarganegaraan menekankan keaktifan siswa di kelas, dengan mengadopsi nilai-nilai kewarganegaraan dari internasional. Standar kompetensinya mencakup pengetahuan kewarganegaraan, partisipasi warga negara, dan perilaku warga negara. Pendidikan kewarganegaraan di Polandia disebut sebagai Pendidikan untuk Warga Negara Demokrasi (EDCP) dan memiliki kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Polandia serta Universitas Ohio di AS. Sementara itu, di Romania, meskipun juga menekankan keaktifan siswa di kelas, negara ini lebih menjunjung tinggi nilai internal dibandingkan nilai internasional. Standar kompetensinya mirip dengan

Polandia, mencakup pengetahuan kewarganegaraan, partisipasi warga negara, dan perilaku warga negara (Gardin, 2016: 75-89).

5. Negara-Negara Liberal

Di negara-negara liberal, pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk membentuk cara berpikir yang rasional dan independen pada anak-anak, tanpa adanya pengaruh doktrin dari orang tua maupun masyarakat. Melalui pendidikan ini, siswa diajak untuk mengevaluasi bakat dan karakter mereka, sambil menumbuhkan sikap menghormati hak dan privasi orang lain, toleransi terhadap keberagaman, serta pemahaman mendalam tentang nilai-nilai demokrasi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga mempersiapkan generasi muda untuk terlibat dalam partisipasi politik, memahami urusan masyarakat dan negara, serta mampu mengevaluasi kebijakan publik secara kritis. Tujuannya adalah untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya mampu membela kepentingan masyarakat, tetapi juga mengkritik pemerintah secara adil dan bertanggung jawab. (Galston, 2004).

Dari berbagai contoh di atas, terlihat bahwa setiap negara memiliki penekanan dan fokus yang berbeda dalam pendidikan kewarganegaraan, sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing. Perbandingan ini menunjukkan keragaman pendekatan dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, esensi dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak lain adalah untuk membentuk warga negara yang memiliki tiga komponen utama, sebagaimana dijelaskan oleh Branson yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*Civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*Civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*Civic dispositions*) (Branson, 1999). Ketiga komponen ini sekiranya saling terkait dan menjadi fondasi bagi terciptanya warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Komponen ini mencakup pemahaman mendalam tentang struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, proses politik, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi warga negara untuk memahami bagaimana sistem politik bekerja, apa peran mereka dalam proses demokrasi, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif. Misalnya, di Norwegia, pengetahuan tentang konstitusi dan lembaga politik menjadi materi wajib dalam pendidikan kewarganegaraan, yang bertujuan untuk membangun kesadaran politik sejak dini.

2. Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Kecakapan ini mencakup keterampilan praktis yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan

masyarakat yang demokratis. Keterampilan ini meliputi kemampuan berdebat, berkolaborasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang informasional. Di Swedia, misalnya, pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk mempersiapkan siswa terlibat dalam praktik demokratis, seperti diskusi tentang isu identitas dan kesetaraan, yang melatih keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif.

3. Watak Kewarganegaraan (*Civic Dispositions*)

Watak kewarganegaraan mencakup sikap, nilai, dan keyakinan yang mendasari perilaku kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab. Ini termasuk rasa empati, rasa hormat terhadap kebebasan dan keadilan, serta komitmen untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan toleransi terhadap keberagaman dan kemampuan untuk mengkritik pemerintah secara adil, yang mencerminkan watak kewarganegaraan yang matang.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau *Civic Education* adalah salah satu bidang yang memiliki misi nasional untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup bangsa Indonesia melalui pendekatan pendidikan berbasis nilai. Kerangka sistemik PKn dibangun dengan tiga paradigma utama diantaranya;

1. Secara Kurikulum, PKn dirancang sebagai mata pelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang memiliki moralitas baik, kecerdasan, sikap partisipatif, dan tanggung jawab.
2. Secara teoritis, PKn disusun sebagai mata pelajaran yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan kesadaran akan pentingnya bela negara.
3. Secara praktis, PKn dirancang sebagai mata pelajaran yang menekankan penyampaian materi berbasis nilai (*Content Embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) melalui berbagai perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi panduan bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PKn juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari ideologi, nilai-nilai, konsep, dan moral Pancasila, serta menekankan pentingnya kewarganegaraan yang demokratis dan semangat bela negara (Sunarso et al., 2016).

Mereduksi beberapa definisi PKn dan perbandingannya di beberapa negara yang ada, Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah ada relevansi antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan pendidikan politik, dan jawabannya tidak hanya "ya," tetapi juga perlu dipahami bahwa PKn sebenarnya adalah salah satu bentuk pendidikan politik itu sendiri. Namun, relevansi ini sering kali diabaikan atau disalahpahami, sehingga

menimbulkan kerancuan dalam memandang esensi PKn. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memahami dan berpartisipasi dalam sistem politik, dan PKn, dalam hal ini, tidak hanya mengajarkan tentang struktur pemerintahan atau hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk kesadaran politik (*political awareness*) dan keterampilan partisipasi politik (*political participation*).

Dengan kata lain, PKn adalah instrumen untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya paham tentang sistem politik, tetapi juga mampu terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Namun, meskipun PKn memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan politik, ada beberapa kritik yang perlu dipertimbangkan, seperti kecenderungan PKn digunakan sebagai alat indoktrinasi oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu tanpa mendorong pemikiran kritis, serta kurangnya fokus pada aspek praktis politik, di mana siswa mungkin diajarkan tentang struktur pemerintahan tetapi tidak diberi kesempatan untuk mempraktikkan partisipasi politik secara nyata.

Selain itu, PKn sering kali terjebak dalam formalitas kurikulum yang kaku, sehingga kehilangan relevansinya dengan dinamika politik kontemporer, seperti isu disinformasi, polarisasi politik, atau krisis lingkungan, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pendidikan politik modern. Kritik lain adalah bahwa PKn cenderung mengabaikan

dimensi global, padahal tantangan politik saat ini bersifat transnasional dan memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab sebagai warga global.

Sebab ada sebagian pandangan yang turut memperkuat adanya keterkaitan yang erat antara PKn dengan pendidikan politik. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Thomas (1994), yang menyederhanakan konsep kewarganegaraan dengan membatasinya pada aktivitas politik formal seperti pemilu, partai politik, dan kelompok kepentingan. Pendekatan ini mempersempit pandangan terhadap kewarganegaraan yang seharusnya mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan moral warga negara.

Dengan demikian, teori tersebut dapat dianggap sebagai perspektif yang terlalu sempit dalam memahami peran dan tanggung jawab individu sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. PKn, dalam konteks ini, seharusnya tidak hanya fokus pada partisipasi politik formal, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan yang memungkinkan warga negara untuk berkontribusi secara aktif dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Tanpa pemahaman yang holistik, PKn berisiko menjadi alat untuk mempertahankan status quo, bukan sebagai instrumen untuk memberdayakan warga negara dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks (Khoiri et al., 2017).

Oleh karena itu, untuk memastikan relevansi PKn dengan pendidikan politik, perlu ada upaya untuk menghindari indoktrinasi, memperkuat aspek kritis, dan meningkatkan fokus pada praktik politik, sehingga PKn dapat

benar-benar menjadi sarana untuk membentuk warga negara yang kritis, inklusif, dan siap menghadapi tantangan demokrasi di masa depan. Oleh karena itu kajian ini akan memfokuskan konteks tujuan dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana pendidikan politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan library research atau studi kepustakaan, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep, tujuan, serta fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana pendidikan politik di berbagai negara dan penerapannya di Indonesia. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yang mencakup buku referensi yang membahas teori dan konsep PKn, pendidikan politik, serta sistem demokrasi; jurnal ilmiah yang membahas studi terkait dengan tujuan dan fungsi PKn dalam pendidikan politik di berbagai negara; dokumen resmi seperti undang-undang, kebijakan pendidikan, kurikulum, dan peraturan pemerintah terkait PKn di Indonesia; serta laporan penelitian terdahulu yang membahas implementasi PKn dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber referensi yang

relevan. Langkah-langkah dalam proses ini meliputi identifikasi sumber dengan mencari dan memilih referensi yang kredibel, klasifikasi data berdasarkan kategori seperti tujuan dan fungsi PKn serta perannya dalam pendidikan politik di berbagai negara, serta analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif dan komparatif untuk memperoleh temuan yang sistematis dan valid. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk menelaah konsep, teori, dan kebijakan terkait PKn serta kaitannya dengan pendidikan politik, serta analisis komparatif yang membandingkan penerapan PKn sebagai sarana pendidikan politik di berbagai negara dan menarik implikasinya bagi Indonesia.

Untuk memastikan kredibilitas dan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai literatur yang berbeda serta melakukan evaluasi terhadap keabsahan referensi yang digunakan, seperti memilih jurnal yang terindeks dan buku yang diterbitkan oleh institusi akademik terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut "*Civicus*" yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi "*Civic*" yang berarti terkait dengan warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata "*Civic*" ini, muncul istilah "*Civics*" yang berarti Ilmu Kewarganegaraan, dan "*Civic Education*," yang berarti Pendidikan Kewarganegaraan. Cholisin (2000) Istilah "*Civics*" sendiri dimaknai sebagai

Ilmu Kewarganegaraan (IKn), yang merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan peran warga negara serta hak dan kewajiban mereka dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Disiplin ini juga mencakup analisis terhadap tugas-tugas pemerintahan melalui pendekatan yuridis formal dan sosio-politis.

Sementara itu, "*Civic education*" (Pendidikan Kewarganegaraan) adalah upaya untuk membina peran warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Dengan demikian, "*Civics*" lebih menekankan pada aspek teoritis dan analitis, sedangkan "*Civic education*" berfokus pada pembentukan karakter, keterampilan, dan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi secara positif dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pandangan lain yang diutarakan oleh Sunarso (2009) menyatakan bahwa, secara teoritis, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education* atau *Citizenship Education*) merupakan pengembangan dari mata pelajaran "*Civics*" yang lebih berfokus pada pendidikan untuk orang dewasa dan lebih berorientasi pada praktik kewarganegaraan (Wahab & Sapriya, 2023). Sementara itu, Stanley E. Dimond dan Elmer F. Pflieger (1970), serta Somantri (1976), yang dikutip oleh Cholisin (2000), memiliki pandangan yang serupa tentang "*Civics*." Mereka mendefinisikannya

sebagai ilmu kewarganegaraan yang berfokus pada hubungan individu dengan negara dalam konteks organisasi yang terstruktur.

Dari perspektif ini, *Civics* tidak hanya mempelajari peran pemerintah tetapi juga hak dan kewajiban warga negara, menawarkan wawasan mendalam tentang dinamika antara warga dan negara. Dengan demikian, *Civics* dan Pendidikan Kewarganegaraan saling melengkapi, di mana *Civics* memberikan landasan teoritis tentang hubungan warga negara dengan negara, sementara Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan aspek praktis dan aplikatif untuk membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, sudah sewajarnya jika *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) berkembang dari *Civics*, yang awalnya berfokus pada aspek ilmu politik, khususnya demokrasi politik. Materinya kemudian meluas untuk mencakup demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan unsur pendidikan. Visi *Civic Education* adalah membangun bangsa dan karakter, memberdayakan warga negara, serta mengembangkan masyarakat madani (*civil society*). Misinya adalah menciptakan warga negara yang lebih baik (*good citizen*), yaitu warga negara yang demokratis dan mampu berpartisipasi secara aktif. Dengan perspektif ini, idealnya ilmu politik tetap menjadi bagian yang dominan (Cholisin, 2005).

Secara substansial, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan suatu negara, yang bertujuan membentuk warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab

mereka terhadap negara dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengembangkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, serta nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan bermasyarakat yang harmonis (Wajdi et al., 2024). Menurut Azra (2000), Pendidikan Kewarganegaraan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pendidikan demokrasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia (Imron Fauzi & Srikantono, 2013).

Secara kontekstual, di Indonesia, PKn dijadikan sebagai mata pelajaran wajib yang diaktualisasikan melalui pendidikan formal dan nonformal. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3), Pasal 30 Ayat (1), dan Pasal 31 Ayat (1), (3), dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, usaha pertahanan dan keamanan negara, serta mendapatkan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu,

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa 'Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.' Dengan demikian, pendidikan

kewarganegaraan merupakan pendidikan yang menguatkan karakter kebangsaan.

Oleh karena itu, dalam tataran PKn sebagai 'keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh,' PKn dapat menumbuhkan *Civic intelligence*, *Civic participation*, serta *Civic responsibility*. Oleh karena itu, kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma:

1. Secara kurikuler, PKn merupakan subjek pembelajaran yang dapat mengembangkan kompetensi individu;
2. Secara teoretis, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat unsur-unsur muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat 'konfluen,' artinya saling berpenetrasi dan terintegrasi;
3. Secara pragmatis, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang lebih menekankan pada isi yang mengandung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) (Putra & Bidmansyah, 2012).

Ada tiga dimensi utama kewarganegaraan yang mendasari partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Pertama, pengetahuan kewarganegaraan (*Civic knowledge*) mencakup pemahaman tentang struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, proses politik, serta nilai-nilai demokrasi yang mendasar. Kedua, kecakapan kewarganegaraan (*Civic skills*) meliputi keterampilan praktis seperti kemampuan berdebat, berkolaborasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi

yang akurat. Ketiga, watak kewarganegaraan (*Civic dispositions*) mencakup sikap, nilai, dan keyakinan yang mendukung perilaku kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab, seperti rasa empati, penghargaan terhadap kebebasan dan keadilan, serta komitmen terhadap partisipasi dalam proses demokrasi sebagai wujud dari tanggung jawab sosial (Branson, 1999).

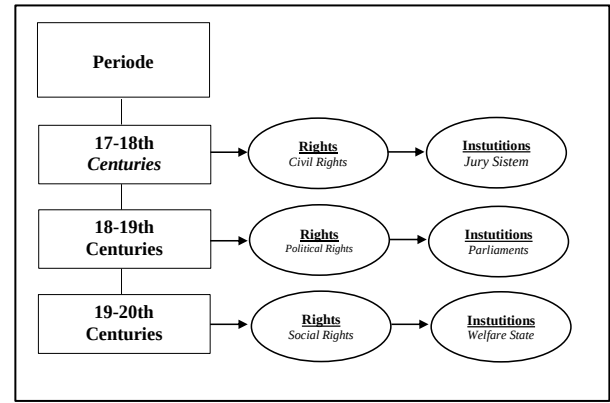
Dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan sentral dalam mengembangkan kesadaran kewarganegaraan yang berdaya di tingkat lokal, nasional, dan global. Pada skala lokal, PKn mengarahkan peserta didik untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam nilai-nilai, sejarah, serta kekayaan budaya yang menjadi bagian integral dari identitas mereka. Hal ini pada gilirannya memperkuat fondasi identitas nasional dan meningkatkan kebanggaan terhadap warisan budaya.

Di ranah nasional, PKn bertindak sebagai katalisator dalam proses pembentukan warga negara yang bertanggung jawab. Hal ini dilakukan melalui penyemaian pemahaman tentang hak dan kewajiban individu dalam konteks sosial-politik, serta penguatan pengetahuan mengenai sistem politik dan pemerintahan negara. Sementara itu, di tingkat global, PKn memperkenalkan peserta didik pada isu-isu global yang mendesak, seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini memiliki relevansi penting dalam membentuk pandangan dunia yang inklusif.

Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Sarana Pendidikan Politik.

Salah satu alasan utama mengapa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) penting sebagai sarana pendidikan politik adalah karena PKn berfungsi sebagai platform untuk mendiskusikan dan memberikan dasar mengenai hak-hak kewarganegaraan. Menyikapi hal tersebut, T.H. Marshall dalam bukunya *Citizenship and Social Class* (1950) mengonseptualisasikan kewarganegaraan berdasarkan tiga hak utama: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil mencakup perlindungan individu terhadap kebebasan, seperti kebebasan berbicara, berkeyakinan, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Hak politik melibatkan partisipasi dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih. Sementara itu, hak sosial mencakup akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Marshall mengaitkan periodisasi ketiga hak kewarganegaraan ini dengan perkembangan sejarah, khususnya di Inggris sebagai negara bangsa. Ketiga bentuk kewarganegaraan tersebut berkembang secara berurutan, dengan hak sipil berkembang pada abad ke-18, hak politik pada abad ke-19, dan hak sosial pada abad ke-20 (Sunarso, 2009).

Soeseno (2010: 23), yang dikutip dari Winda Roselina Effendi (2018), menginterpretasikan kategori kewarganegaraan berbasis hak model Marshall (1950) berdasarkan periode. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Kewarganegaraan TH Marshall

Gambar di atas menjelaskan bahwa pada abad ke-17 dan ke-18, fokus utama dalam perkembangan hak-hak berada pada hak-hak sipil, yang mencakup hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak atas properti. Ini adalah periode di mana ide-ide tentang hak asasi manusia mulai diperjuangkan secara luas, memengaruhi perkembangan hukum dan tatanan sosial di berbagai negara Eropa dan Amerika. Pergeseran signifikan terjadi pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, ketika hak politik mulai mendapatkan perhatian besar. Hak politik mengacu pada partisipasi dalam pemerintahan, seperti hak untuk memilih dan dipilih, serta terlibat dalam proses politik secara langsung. Periode ini ditandai dengan gerakan demokratisasi yang semakin memperluas partisipasi politik di berbagai negara, meskipun dengan berbagai derajat keberhasilan dan tantangan.

Memasuki abad ke-19 hingga awal abad ke-20, fokus perhatian beralih ke hak-hak sosial. Hak sosial mencakup perlindungan sosial dan ekonomi dari negara, seperti hak atas pendidikan, perumahan yang layak, kesehatan, dan perlindungan pekerjaan. Periode ini menyaksikan munculnya negara kesejahteraan

(welfare state) di banyak negara Eropa, yang bertujuan menyediakan jaminan sosial bagi warganya sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang semakin jelas.

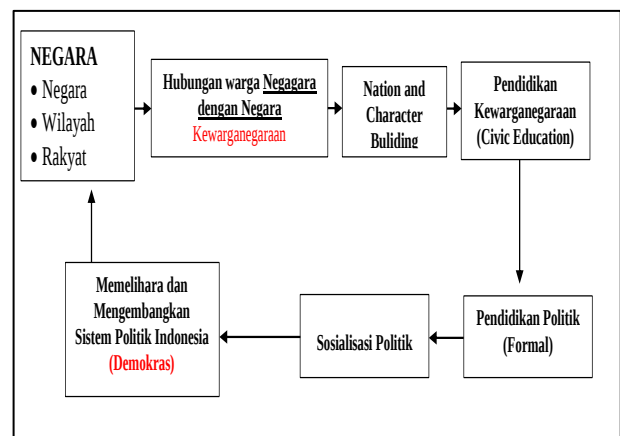
Secara institusional, perkembangan ini juga tercermin dalam perubahan yang terjadi. Pada abad ke-17, sistem juri (jury system) mulai berkembang sebagai mekanisme pengadilan yang melibatkan partisipasi warga biasa dalam proses hukum. Abad ke-18 melihat perluasan peran parlemen sebagai lembaga representatif yang memegang kendali dalam pembuatan keputusan politik.

Pada abad ke-19, negara kesejahteraan (welfare state) muncul sebagai bentuk institusi yang bertanggung jawab menyediakan layanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, menggambarkan evolusi peran negara dalam urusan sosial dan ekonomi. Periode ini menandai transisi signifikan dalam evolusi hak-hak, peran politik, dan struktur institusional di berbagai negara, mencerminkan perjuangan dan transformasi dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah.

Secara ideal, terdapat korelasi yang erat antara PKn dan pendidikan politik. Menurut Cholisin (2010), hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa akar keilmuan PKn bersumber dari politik, yang kemudian ditunjang oleh Ilmu Hukum dan Filsafat Moral/Filsafat Pancasila sebagai pendukung utama PKn. Hal serupa diungkapkan oleh Zamroni (2007:137), yang menyatakan bahwa konsekuensi dari PKn adalah pendidikan politik. Definisi ini dapat dimaknai bahwa Pendidikan Kewarganegaraan

diposisikan sebagai instrumen yang mampu membentuk dan mengajarkan orientasi, sikap, dan perilaku politik. Tujuannya adalah agar individu memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, political participation, dan the ability to make rational political decisions, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan (Cholisin, 2010).

Lebih lanjut, dalam PKn juga dikenal istilah batang tubuh yang meliputi beberapa unsur. Batang tubuh tersebut dapat dilihat pada gambar berikut;

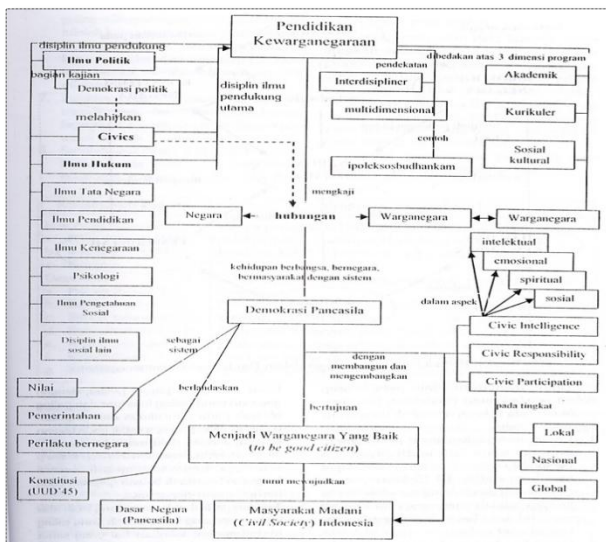


Gambar 2. Batang Tubuh PKn

Sumber: Cholisin, (2010)

Teori sistem yang diterapkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadikan PKn berperan dalam mempertahankan dan memelihara sistem politik nasional, khususnya sistem politik demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, pengembangan materi PKn dalam bidang politik terutama berfokus pada konsep demokrasi politik dari ilmu politik. Konsep demokrasi politik ini dipahami dalam kerangka ilmu politik, mencakup pemikiran, filsafat, teori, ideologi, serta aplikasinya dalam konstitusi dan sistem politik.

Pengembangan konsep dan teori lain dari ilmu politik juga diperlukan untuk memahami demokrasi politik secara komprehensif, dengan tujuan membentuk warga negara yang baik. Ini mencakup teori sistem (dalam sosialisasi politik), politik kewarganegaraan, budaya politik kewarganegaraan, pemberdayaan warga negara, masyarakat kewarganegaraan, dan kewarganegaraan global. Intinya, dasar keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah ilmu politik, yang mengintegrasikan unsur-unsur demokrasi politik dan dikembangkan secara interdisipliner. Dalam pengembangan interdisipliner ini, PKn memanfaatkan konsep dan teori yang tidak hanya berasal dari bidang ilmu sosial, tetapi juga dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar peta konsep PKn berikut:



Gambar 3. Peta Konsep PKn Secara Utuh
Sumber: Cholisin, (2010)

Berkenaan dengan hal itu, Kerr (dikutip dari Winataputra, 2007:4) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau *Civic education* secara luas mencakup persiapan generasi muda untuk peran dan tanggung jawab

mereka sebagai warga negara, dengan menekankan peran pendidikan melalui sekolah, pengajaran, dan pembelajaran dalam proses persiapan tersebut. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana individu mempelajari orientasi sikap dan perilaku politik, sehingga mereka memiliki pengetahuan politik, kesadaran, sikap, efikasi politik, partisipasi politik, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional (Hemafitria & Rianto, 2015).

Merdeuksi ulasan-ulasan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan politik, tetapi masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Kurikulumnya cenderung normatif dan kurang mendorong pemikiran kritis, sehingga berisiko menjadi alat legitimasi negara daripada wadah pembentukan kesadaran politik yang independen. Dalam praktiknya, PKn lebih banyak menanamkan kepatuhan terhadap sistem ketimbang membangun kemampuan analitis terhadap realitas politik yang kompleks.

Selain itu, pendekatan pengajaran yang masih didominasi oleh metode satu arah menyebabkan rendahnya partisipasi aktif siswa dalam memahami politik secara kontekstual. Kurangnya integrasi dengan realitas sosial dan politik terkini juga membuat PKn sering kali terlepas dari dinamika demokrasi yang berkembang. Jika tidak direformasi, PKn berisiko gagal dalam membentuk warga negara yang kritis dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam sistem demokrasi.

Pembaruan kurikulum yang lebih adaptif terhadap perubahan politik global, penerapan metode pembelajaran yang interaktif, serta penyelarasan materi dengan praktik demokrasi yang nyata menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa perubahan fundamental, PKn hanya akan menjadi pelajaran formal yang tidak memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap konteks tujuan, fungsi, serta peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana pendidikan politik, dapat disimpulkan bahwa PKn memiliki peran sentral dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka terhadap negara dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengembangkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, dan moralitas yang mendasari kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Sebagai instrumen pendidikan, PKn berfungsi untuk membangun karakter kebangsaan, meningkatkan kesadaran politik, dan mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Melalui pendekatan interdisipliner, PKn mengintegrasikan ilmu politik, hukum, dan filsafat moral untuk menciptakan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Selain itu, PKn berfungsi sebagai platform untuk mendiskusikan dan memberikan dasar mengenai hak-hak kewarganegaraan, termasuk hak sipil, hak

politik, dan hak sosial. Sebagai sarana pendidikan politik, PKn bertujuan membentuk warga negara yang memiliki political knowledge, political awareness, political attitude, political efficacy, dan political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional, yang tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan teori dan konsep dari ilmu politik, PKn membantu mempertahankan dan memelihara sistem politik nasional, khususnya sistem demokrasi Pancasila, sekaligus mempersiapkan warga negara untuk menghadapi tantangan global seperti disinformasi, polarisasi politik, dan krisis lingkungan. Secara keseluruhan, PKn tidak hanya berperan sebagai mata pelajaran akademis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis, inklusif, dan siap berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR RUJUKAN

- Branson, M. S. (1999). *Seri Pendidikan Politik Belajar'Givic Education' dari Amerika*. 1–88.
- Cholisin. (2000). Ilmu Kewarganegaraan. In *Pustaka Ut. Ac.Id.* <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4311-M1.pdf>
- Cholisin. (2005). Struktur Keilmuan PPKn. *Eksistensi, Tantangan Dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) Di Perguruan Tinggi*, 1–10.
- Cholisin. (2010). *PKN (CIVIC EDUCATION) SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK , PENDIDIKAN DEMOKRASI, DAN PENDIDIKAN HAM*. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan P. T. R. I. 2016. (2016). BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB UMUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 232. <http://repository.lppm.unila.ac.id/28164/1/3272-Kewarganegaraan.pdf>
- Hemafitria, & Rianto, H. (2015). Pembelajaran PKN Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 175–189. <https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/edukasi/article/view/114>
- Imron Fauzi, & Srikantono. (2013). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Civic Education). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). SUPERIOR “Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial.”
- Khoiri, M., Tiara, M., Ahmad, Z. Bin, Trisno, A., & Rahman, A. (2017). *Puspagram Pendidikan Kewarganegaraan : Di Berbagai Negara*. [http://repository.unp.ac.id/15809/1/Pusparagam OK.pdf](http://repository.unp.ac.id/15809/1/Pusparagam%20OK.pdf)
- Putra, U. S. W., & Bidmansyah, D. (2012). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF INTERNATIONAL (KONTEKS TEORI, DAN PROFIL PEMBELAJARAN). In *Widya Aksara Prees*.
- Rinenggo, A. (2021). Kontroversi Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal. ... (*Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan*), 01. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/waspada/article/view/233>
- Subdi, T. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). In *BP-FKIP UMS*.
- Sunarso. (2009). Warga Dan Pendidikan Kewarganegaraan(Kajian Konsep dan Sejarahnya). *Humanika (Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum)*, 6(1), 1–24.
- Sunarso, Sartono, E., & Dwikusrahmadi, S. (2016). *e-book Pendidikan Kewarganegaraan Pkn Untuk Perguruan Tinggi*.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2023). TEORI DAN LANDASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. In *Pt. Remaja Rosdakarya*.
- Wajdi, F., Subandi, Y., Soeikromo, D., Soegoto, A. S., Iriansyah, H. S., Ahmad, D., & Surya, A. (2024). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk perguruan Tinggi*. Penerbit Widina Media Utama.
- Winda Roselina Effendi. (2018). Konsepsi Kewarganegaraan Dalam Perspektif Tradisi LiberalDan Republikan. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 55–62.